



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Alamat : Jl.Wolter Monginsidi No.1 Telp : (0541)-6724936 Fax : (0541)-6724936
Website : www.dprdkutaikartanegara.go.id E-mail : setwan@dprdkutaikartanegara.go.id Kode Pos : 75511

NOTULA RAPAT PANSUS

I. AGENDA

Fasilitasi Rapat Pansus Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kab Kutai Kartanegara dengan pihak-pihak terkait.

II. LEMBAR IDENTITAS

Tanggal : Kamis, 5 Oktober 2023

Waktu : 10:00 – 12:30 Wita

Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPRD Kab Kutai Kartanegara

III. PESERTA RAPAT

Sesuai dengan daftar hadir rapat.

IV. PROSES RAPAT

- Abdul Rahman, S.Ag:
 - Pembukaan.
 - Inisiatif DPRD : pasca Covid-19, mencanangkan proteksi terhadap pekerja rentan. Ini yang akan kami jabarkan di nomenklatur raperda ini. Kalau pekerja rentan, hanya sedikit sekali sasarannya.
 - Kita perlu benahi dulu raperda ini agar dapat berguna bagi masyarakat.
 - Kami mau mengembangkan raperda ini agar raperda ini dapat berdayaguna bagi seluruh warga Kukar.
- Agus, BPJS TK:
 - Kukar adalah satu-satunya kabupaten yang memberikan BPJS TK ke 35.000 pekerja rentan sejak 2021. Kalau iuran, tepat 2 tahun. Dari 35.000 pekerja, ratusan yang meninggal dunia. Salah satunya ada yang meninggal karena dimakan buaya.
 - Seluruh anggota DPRD Kota Samarinda sudah terdaftar di BPJS TK. Yang diregulasi hanya 2 program, tetapi bisa 5 program itu masuk biaya mandiri yang tidak menggunakan beban APBD.
 - 35.440, 479 meninggal. Iuran Kukar selama ini 14 Milyar, sementara klaim BPJS JKM yang sudah dibayarkan adalah 15.204.000.000.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Alamat : Jl.Wolter Monginsidi No.1 Telp : (0541)-6724936 Fax : (0541)-6724936
Website : www.dprdkutaikartanegara.go.id E-mail : setwan@dprdkutaikartanegara.go.id Kode Pos : 75511

- Mereka tidak suka didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Ini, tanpa persetujuan yang bersangkutan pun juga bisa didaftarkan.
- Bisa disinergikan antara DPRD kundapil dengan BPJS TK. Ada transparansi data untuk DPRD, tetapi tidak untuk umum.
- Saya sudah baca draft Raperdanya, kalau diizinkan, saya akan memberikan tambahan. Dari draft sederhana ini, ini hanya membahas pekerja sektor informal saja. Harusnya lengkap. Perda ini sudah memuat pekerja formal dan informal. Pekerja formal bukan yang dilindungi.
- Kami akan memberikan masukan desainnya. Pekerja rentan 35.000, dari provinsi memberikan 21.000 per oktober, pekerja rentan di kukar 57.000 yang akan terlindungi BPJS TK.
- Kami kurang sosialisasi agar tidak terjadi double data.
- Miswar, BPJS TK:
 - Sampai dengan saat ini warga hanya tau BPJS Kesehatan.
 - 6 program dasar melekat di setiap warga negara. BPJS Kesehatan memegang 1 program, 5 program di BPJS Ketenagakerjaan.
- Sopan Sofian:
 - BPJS Kesehatan terkait premi denda berlaku akumulasi. Bagaimana BPJS Ketenagakerjaan?
 - Bagaimana THL di desa-desa?
- BPJS TK:
 - Santunan wajib diberikan sesuai UU, jika tidak terdaftar BPJS Ketenagakerjaan maka perusahaan yang harus menanggungnya dengan nilai yang sama.
 - Bunyi UU pekerja non formal sifatnya sukarela. Diberikan masa tunggu 90 hari setelah tidak aktif.
- Hendra, Kabid HI, Disnakertrans:
 - Terkait perangkat desa, itu termasuk penerima upah. Itu mekanismenya bisa melalui Dinas PMD.
 - 7,1 Milyar setahun dengan dasar data DTKS. Kita bersinergi dengan perangkat daerah terkait. Termasuk nelayan sampai marbot masjid. SK Tim pelaksana BPJS pekerja rentan sudah ada.
 - Ada THL, alokasi anggaran melekat di SKPD masing-masing. Ketua RT sudah terdaftar di BPJS TK melalui dinas PMD. Perangkat RT akan dialokasikan murni 2024 melalui dinas PMD.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Alamat : Jl.Wolter Monginsidi No.1 Telp : (0541)-6724936 Fax : (0541)-6724936
Website : www.dprdkutaikartanegara.go.id E-mail : setwan@dprdkutaikartanegara.go.id Kode Pos : 75511

- Nur, Set.DPRD:
 - Kalau BPJS kesehatan, 1% pribadi, 4% APBD. Kalau BPJS TK bagaimana sistem itu dan contohnya seperti apa?
- Agus BPJS TK:
 - 0,4% itu tanggung jawab pemberi kerja. Ketika dinaikkan ke JHT, itu 5,7%, sharing 3,7% pemberi kerja, 2% dari pekerja. Regulasi yang tidak kuat, 5,7% itu mandiri.
- Sopan:
 - Ada kekhawatiran masyarakat terkait asuransi. Ini BPJS Ketenagakerjaan adalah jaminan sosial, bukan pada penekanan asuransi-nya.
- Hendra:
 - Dibayarkan per event: mekanisme.
 - Penutup

V. PENUTUP

Demikian Notula rapat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana fungsinya.

Pimpinan Rapat

Abdul Rahman, S.Ag